



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta kondisi riil kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 serta tetap selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2025-2029.

Secara umum, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD menunjukkan capaian yang baik, dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, antara lain belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, rendahnya efektivitas penerimaan pajak daerah, serta adanya kegiatan dengan tingkat serapan anggaran yang belum optimal. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan keterbatasan aktivitas sektor tertentu turut mempengaruhi capaian pendapatan daerah.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian ini mencakup perubahan alokasi anggaran baik berupa penambahan maupun pengurangan, sebagai upaya optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Seluruh program dan kegiatan tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain opini BPK atas laporan keuangan, kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah, serta peningkatan efektivitas pendapatan daerah.

Program yang dilaksanakan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Keempat program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kinerja pendapatan daerah.

Perubahan Renja ini juga mencerminkan komitmen BPKPD dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran dapat berjalan lebih optimal dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Natuna.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Penyusunan Perubahan Renja ini merupakan tindak lanjut atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, perubahan asumsi makro, dan kondisi riil kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025.

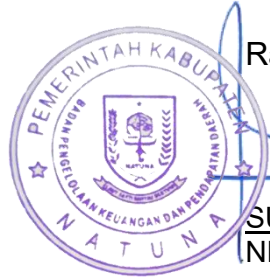
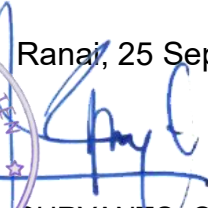
Perubahan Renja ini memuat penyesuaian terhadap target kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk perubahan pagu anggaran baik yang mengalami penambahan maupun pengurangan. Penyesuaian tersebut dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Secara umum, Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga mencerminkan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, melalui penyesuaian belanja daerah, penajaman prioritas program, serta optimalisasi sumber-sumber pendanaan daerah yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan.

Diharapkan Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai wujud komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*),

serta diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ranai, 25 September 2025

SURYANTO, SE., MA
NIP. 19770912 200012 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	20
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	25
3.2.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD	25
3.2.2 Sasaran Jangka Menengah BPKPD.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	30
4.2 Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Realisasi Anggaran per Program Realisasi Anggaran per Program	10
Tabel 2. 2	Evaluasi Rencana Kerja BPKPD Kabupaten Natuna s.d Triwulan I Tahun 2025.....	13
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2026	28
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2030	29
Tabel 4. 1	Perubahan Renja SKPD BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan Renja disusun sebagai respon terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, dan kemampuan keuangan daerah.

Secara normatif, penyusunan Perubahan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan tahunan perlu dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan asumsi, prioritas pembangunan, serta kondisi keuangan daerah. Selain itu, Perubahan Renja juga mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025, serta tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada semester sebelumnya. Penyesuaian tersebut mencakup perubahan target kinerja serta pagu anggaran, baik yang mengalami penambahan maupun pengurangan, guna mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlunya dilakukan

perubahan, antara lain penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, optimalisasi belanja daerah, serta penyesuaian terhadap kondisi riil kemampuan keuangan daerah. Selain itu, perubahan juga dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, serta mampu meningkatkan kualitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Dengan demikian, Perubahan Renja ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 439).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berjalan;

2. Menajamkan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan riil pelayanan perangkat daerah;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah;
4. Menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap capaian kinerja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Renja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan Tahun 2025.

BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I menunjukkan dinamika kinerja yang dapat dianalisis melalui pendekatan realisasi anggaran berbasis Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan data LRA, total anggaran belanja BPKPD Tahun 2025 sebesar Rp16.880.115.190,00 untuk belanja operasi, dengan realisasi sebesar Rp3.389.355.549,00, atau sekitar 20,08 persen dari pagu anggaran. Selain itu, terdapat komponen belanja transfer sebesar Rp116.836.411.400,00 dengan realisasi Rp35.854.637.530,00, yang menunjukkan capaian sekitar 30,69 persen.

Jika ditinjau berdasarkan struktur program, pelaksanaan anggaran pada Triwulan I menunjukkan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pagu belanja operasi sebesar Rp12.765.372.842,00 dengan realisasi sebesar Rp2.647.262.240,00, atau sekitar 20,74 persen. Capaian ini didorong oleh realisasi belanja pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang, serta administrasi umum yang bersifat rutin dan berkelanjutan dalam mendukung operasional perangkat daerah.

Sementara itu, Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pagu sebesar Rp2.727.270.878,00 dengan realisasi sebesar Rp555.755.309,00, atau sekitar 20,38 persen. Realisasi ini terutama berasal dari kegiatan koordinasi penyusunan anggaran daerah, pengelolaan perbendaharaan, serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Di sisi lain, terdapat komponen belanja transfer yang cukup signifikan dalam program ini, yang telah terealisasi sebesar Rp35.854.637.530,00, mencerminkan fungsi strategis BPKPD dalam pengelolaan transfer keuangan daerah.

Untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, pagu anggaran sebesar Rp858.735.470,00 dengan realisasi sebesar Rp43.963.000,00, atau sekitar 5,12 persen. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan aset masih berada pada tahap awal, seperti inventarisasi, penatausahaan, dan pengamanan aset daerah yang belum memerlukan belanja signifikan pada triwulan pertama.

Adapun Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki pagu sebesar Rp528.736.000,00 dengan realisasi sebesar Rp142.375.000,00, atau sekitar 26,92 persen. Capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan program lainnya, mengingat karakteristik kegiatan yang bersifat operasional, seperti pendataan, penagihan, dan pengawasan pajak daerah yang telah mulai dilaksanakan secara aktif sejak awal tahun anggaran.

Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran pada Triwulan I menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada kisaran rendah hingga moderat, yang merupakan fenomena umum dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh dominasi tahapan awal pelaksanaan kegiatan, termasuk proses administrasi, perencanaan teknis, serta pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, dari sisi capaian kinerja output, sebagian besar kegiatan telah menunjukkan progres yang baik dan berada pada jalur yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis data LRA Triwulan I Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Natuna telah berjalan dengan cukup baik dari sisi kinerja administratif dan operasional, namun masih memerlukan percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya guna memastikan keseimbangan antara capaian output dan penyerapan keuangan. Upaya percepatan ini menjadi penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program, menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, serta memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran Tahun 2025, kondisi capaian tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan efisiensi belanja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari upaya menjaga

stabilitas fiskal nasional. Kebijakan tersebut antara lain dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja secara selektif, rasional, dan berbasis prioritas.

Selain itu, kebijakan efisiensi juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengatur penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah sebagai bagian dari upaya pengendalian fiskal nasional. Kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang menekankan pada optimalisasi belanja, pengendalian defisit, serta peningkatan kualitas belanja publik (*spending quality*). Dalam implementasinya, pemerintah daerah didorong untuk melakukan penajaman prioritas program, pembatasan belanja yang kurang produktif, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Dampak dari kebijakan efisiensi tersebut turut mempengaruhi pola pelaksanaan kegiatan di daerah, termasuk pada BPKPD Kabupaten Natuna, dimana terdapat kecenderungan penyesuaian jadwal kegiatan, penundaan sebagian belanja, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini berkontribusi terhadap relatif rendahnya realisasi keuangan pada Triwulan I, meskipun capaian kinerja output tetap menunjukkan progres yang baik.

Dengan demikian, pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara umum berada pada kategori cukup baik, namun masih memerlukan upaya percepatan dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penumpukan kegiatan dan belanja pada akhir tahun anggaran, serta untuk memastikan tercapainya target

kinerja secara optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait capaian program dan kegiatan, selanjutnya disajikan tabel realisasi kinerja dan anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Realisasi Anggaran per Program Realisasi Anggaran per Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	13.163.550.602,00	2.647.262.240,00	20,11
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	121.039.267.768,00	36.410.392.839,00	30,08
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	858.735.470,00	43.963.000,00	5,12
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	528.736.000.00	142.375.000.00	26,93
Jumlah		135.590.289.940,00	39.243.993.079,00	28,94

Sumber: LRA BPKPD s.d Triwulan I 2025

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian realisasi anggaran pada masing-masing program menunjukkan variasi yang mencerminkan karakteristik pelaksanaan kegiatan pada tahap awal tahun anggaran.

Capaian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercatat sebesar 20,11 persen, dengan realisasi sebesar Rp2.647.262.240,00 dari pagu anggaran sebesar Rp13.163.550.602,00. Capaian ini relatif masih rendah karena sebagian besar kegiatan dalam program ini bersifat administratif dan rutin, dengan pola realisasi yang cenderung meningkat pada triwulan berikutnya seiring dengan berjalannya kegiatan operasional secara penuh.

Selanjutnya, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 30,08 persen, dengan realisasi sebesar Rp36.410.392.839,00 dari pagu sebesar Rp121.039.267.768,00. Capaian ini merupakan yang tertinggi dibandingkan program lainnya, yang didorong oleh adanya realisasi belanja transfer serta kegiatan pengelolaan keuangan yang telah berjalan secara operasional sejak awal tahun anggaran.

Untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, capaian realisasi anggaran masih tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 5,12 persen, dengan realisasi sebesar Rp43.963.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp858.735.470,00. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah masih berada pada tahap awal, khususnya pada kegiatan inventarisasi, penilaian, serta penatausahaan Barang Milik Daerah yang belum memerlukan belanja signifikan pada triwulan pertama.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 26,93 persen, dengan realisasi sebesar Rp142.375.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp528.736.000,00. Capaian ini relatif lebih baik dibandingkan sebagian program lainnya, yang disebabkan oleh karakteristik kegiatan yang bersifat operasional, seperti pendataan, penagihan, dan pengawasan pajak daerah yang telah mulai dilaksanakan secara aktif.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran dari keempat program tersebut mencapai sebesar Rp39.243.993.079,00 dari total pagu Rp135.590.289.940,00, atau sebesar 28,94 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan I masih berada pada tahap awal, namun telah menunjukkan progres yang cukup baik terutama pada program yang bersifat operasional.

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga) program yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan capaian realisasi anggaran, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program dengan capaian terendah, yaitu sebesar 5,12 persen. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan beberapa sub kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah, yang pelaksanaannya membutuhkan tahapan teknis dan administratif yang relatif lebih panjang.

Secara umum, pola realisasi anggaran pada Triwulan I ini menunjukkan bahwa capaian keuangan masih relatif rendah dibandingkan target tahunan, yang merupakan karakteristik umum dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, capaian tersebut tetap memerlukan perhatian melalui upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan efektivitas perencanaan, serta penguatan monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun.

Selanjutnya, capaian kinerja anggaran kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

5.02.01.2.09		Peremajaan Barang Misk Daerah Penunjang Usaha Pemeliharaan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang usaha pemeliharaan	peremajaan	89	1.317.191.205	100	100	90	779.000.000	90	265.641.120	35	20.982.400	35,00	20.982.400,00	38,99	7,36	100,00	20.982.500	100	7,96	
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	Kenderaan	37	183.129.235	100	100	0	120.000.000	12	177.054.500	3	11.302.400	3,00	11.302.400,00	25,00	6,38	100,00	11.302.500	100	6,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.06		Peremajaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan	0	0	0	0	0	50.000.000	0	7.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.09		Peremajaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Gedung	17	1.032.414.470	100	100	0	530.000.000	0	29.807.760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	100	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.11		Peremajaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Sarana	25	101647500	100	100	0	30.000.000	12	51.678.960	3	9.680.000	3,00	9.680.000,00	25,00	18,73	103,00	9.680.100	100	18,73	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02	Meningkatnya Birokrasi yang Bersah dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peroran	100	305.477.386.467	100	100	100	3.389.790.000	100	806.447.000	95	153.613.430	95,00	153.613.430,00	95,00	23,21	100,00	153.613.530	100	24,27	
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	Peroran	100	3.056.736.134	100	100	100	1.469.500.000	100	283.061.500	100	78.952.179	100,00	78.952.179,00	100,00	27,89	100,00	78.952.279	100	27,89	
5.02.02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	52	922.044.608	100	100	1	300.000.000	1	66.955.119	1	50.679.379	1,00	50.679.379,00	100,00	75,99	100,00	50.679.479	100	75,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitas, Rekrutasi, Sertifikasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sertifikasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	31	1.408.556.175	100	100	12	318.500.000	12	157.064.900	3	9.578.900	3,00	9.578.900,00	25,00	6,10	100,00	9.579.000	100	6,10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemolangan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemolangan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	63	765.135.351	100	100	12	500.000.000	12	56.041.610	3	16.494.000	3,00	16.494.000,00	25,00	31,32	100,00	16.494.100	100	31,32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	Laporan	95	2.539.785.903	100	100	98	1.921.200.000	98	328.336.400	95	74.661.252	95,00	74.661.252,00	96,94	22,88	100,00	74.661.352	100	22,88	
5.02.02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	19	947.079.824	100	100	12	250.000.000	12	66.482.750	3	3.094.000	3,00	3.094.000,00	25,00	4,63	103,00	3.094.100	100	4,63	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Asas, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Biaya, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Asas, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Biaya, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Dokumen	16	129.067.500	100	100	12	120.000.000	12	824.000	3	824.000	3,00	824.000,00	25,00	100,00	103,00	824.100	100	100,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	27	716.116.799	100	100	12	181.200.000	12	57.665.000	3	22.897.900	3,00	22.897.900,00	25,00	39,71	103,00	22.897.900	100	39,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.04		Korelasikan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	30	362.143.946	100	100	0	350.000.000	12	110.202.000	3	43.467.900	3,00	43.467.900,00	25,00	39,44	103,00	43.467.900	100	39,44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalihan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalihan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan	5	308.550.741	100	100	2	150.000.000	2	56.430.000	1	0	1,00	0,00	50,00	0,00	101,00	0	100	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	69.791.249	100	69,79	1	100.000.000	1	25.467.650	1	3.817.650	1,00	3.817.650,00	100,00	14,99	101,00	3.817.750	51	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Turbulen Perbendaharaan dan Turbulen Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Turbulen Perbendaharaan dan Turbulen Kerugian Daerah	Dokumen	3	44.529.600	100	66,06	0	50.000.000	1	9.285.000	1	960.000	1,00	960.000,00	100,00	6,03	101,00	960.000	51	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04		Penunjang Usaha Keunggulan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Bagi Hasil	10	349.636.867.370	100	100	10	145.260.000.000	10	127.437.254.250	10	35.854.637.530	10,00	35.854.637.530,00	100,00	28,14	110,00	35.854.637.630	2	0	
5.02.02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Laporan	3	537.981.037.400	75	100	4	135.100.000.000	4	112.504.357.250	1	35.854.637.530	1,00	35.854.637.530,00	25,00	32,31	76,00	35.854.637.630	25	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih berada pada tahap awal pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran pada program-program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama, yang mulai menunjukkan progres, terutama pada kegiatan yang bersifat operasional dan administratif.

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga) program yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian kinerja utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan variasi antar program. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat capaian realisasi sebesar 30,08 persen, yang merupakan capaian tertinggi di antara program lainnya. Hal ini didorong oleh pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang telah berjalan sejak awal tahun, termasuk realisasi belanja transfer serta kegiatan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan capaian realisasi sebesar 26,93 persen, yang juga relatif baik pada triwulan awal, mengingat kegiatan yang bersifat operasional seperti pendataan, penagihan, dan pengawasan pajak daerah telah mulai dilaksanakan secara aktif.

Sementara itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program dengan capaian realisasi anggaran paling rendah, yaitu sebesar 5,12 persen. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Berdasarkan hasil analisis, rendahnya capaian realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dipengaruhi oleh belum

optimalnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan strategis, khususnya:

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Penilaian Barang Milik Daerah.

Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, rendahnya capaian disebabkan oleh kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan teknis dan pengumpulan data, sehingga belum memerlukan realisasi anggaran yang signifikan pada triwulan pertama. Selain itu, terdapat faktor administratif yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran belum dapat direalisasikan secara optimal.

Sementara itu, pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, rendahnya capaian realisasi anggaran dipengaruhi oleh terbatasnya pelaksanaan kegiatan penilaian aset. Hal ini berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas yang menjadi komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dampaknya, kegiatan penilaian aset yang dilaksanakan pada Triwulan I masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah objek maupun cakupan wilayah, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi anggaran.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan BPKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun realisasi keuangan masih relatif rendah, namun pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Kondisi ini merupakan pola umum dalam siklus pelaksanaan anggaran, dimana capaian kinerja pada awal tahun lebih didominasi oleh output administratif, sementara realisasi keuangan akan meningkat secara bertahap pada triwulan berikutnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada program yang memiliki capaian realisasi rendah, melalui penguatan perencanaan operasional, percepatan proses pengadaan, serta peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan kegiatan, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan Bupati, pada Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp135.590.289.940,00 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp39.243.993.079,00 atau mencapai 28,94 persen dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat serapan anggaran masih berada pada tahap awal pelaksanaan, yang merupakan karakteristik umum dalam siklus pengelolaan keuangan daerah pada triwulan pertama.

Meskipun demikian, dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian tersebut telah mencerminkan adanya progres yang cukup baik, khususnya pada kegiatan yang bersifat operasional dan administratif yang telah mulai berjalan sesuai dengan perencanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, capaian realisasi anggaran yang masih relatif rendah tersebut menunjukkan perlunya upaya percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan yang memerlukan belanja signifikan, seperti pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lapangan. Selain itu, penguatan perencanaan kas, percepatan proses administrasi, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi serapan anggaran.

Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I belum menunjukkan capaian yang tinggi secara persentase, namun pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, dan diharapkan dapat mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan berikutnya dalam rangka mencapai target kinerja secara optima

Namun demikian, capaian kinerja tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian indikator kinerja yang

mendukung IKU. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator dimaksud, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga indikator ini telah mencapai target sebesar 100 persen.

Capaian opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dari sisi akuntabilitas dan pelaporan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan peningkatan berkelanjutan pada aspek kualitas pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

2. Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator pengelolaan BMD, diperoleh capaian sebesar 87,62 persen, yang menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum optimal.

Meskipun capaian berada pada kategori cukup tinggi, hasil tersebut mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam aspek pengelolaan aset, seperti inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi nilai ekonomi aset daerah serta berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, rasio efektivitas pajak daerah tercatat sebesar 69,36 persen, yang menunjukkan kinerja pemungutan pajak daerah belum efektif dan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rendahnya rasio efektivitas pajak daerah disebabkan oleh tidak tercapainya target pada beberapa jenis pajak utama, antara lain:

- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) Realisasi penerimaan hanya sebesar Rp14.737.632.984,00 atau 39,25 persen dari target sebesar Rp37.550.531.253,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh tidak optimalnya kegiatan ekspor pasir kuarsa akibat faktor eksternal, seperti kondisi cuaca serta penurunan harga jual di pasar regional, yang menyebabkan pelaku usaha tidak melaksanakan kegiatan produksi dan ekspor secara maksimal.
- b. Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet Kedua jenis pajak ini belum memberikan kontribusi penerimaan pada Tahun 2024, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya basis pajak, serta belum optimalnya pengawasan dan penagihan.
- c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Realisasi penerimaan sebesar Rp395.216.351,00 atau 26,35 persen dari target, menunjukkan adanya penurunan aktivitas transaksi properti serta kemungkinan adanya faktor administratif dan kepatuhan yang mempengaruhi rendahnya penerimaan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan baik, namun masih terdapat ketimpangan pada aspek pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pada sisi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dan telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, saat ini dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas capaian kinerja yang tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada *outcome* dan *impact* yang terukur serta dapat dievaluasi secara komprehensif. Sejalan dengan hal tersebut, ketersediaan data yang akurat serta integrasi data secara nasional menjadi isu strategis yang terus didorong melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Di sisi lain, pemerintah daerah dengan kewenangan otonominya telah mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan data perencanaan. Namun demikian, kewajiban penggunaan sistem yang terintegrasi secara nasional menuntut adanya kesiapan daerah, baik dari aspek kelembagaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya kapasitas sumber daya manusia di tingkat perangkat daerah dalam mengoperasikan sistem berbasis SIPD secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain masih terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi, khususnya terkait stabilitas jaringan data yang belum memadai, sehingga sering mengalami gangguan akses. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kelancaran proses penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPD.

Selain itu, kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan belanja APBD masih belum optimal. Hal ini tercermin dari penyusunan dokumen RKA dan DPA yang belum sepenuhnya rinci dan terukur, serta masih seringnya terjadi pergeseran anggaran pada saat pelaksanaan. Di sisi lain, peran dan fungsi pejabat pengelola keuangan belum berjalan secara optimal, dimana dalam praktiknya pelaksanaan penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPD masih didominasi oleh pelaksana teknis di bawahnya.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan pembinaan terhadap pejabat pengelola keuangan perangkat daerah, baik dalam pemahaman regulasi maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,

guna mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan pada perangkat daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
4. Masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum tergali dan dioptimalkan secara maksimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah, baik dari aspek perencanaan, pemungutan, maupun pengawasan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan yang masuk benar-benar relevan, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi publik.

Namun demikian, dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, usulan program dan kegiatan masyarakat tidak dapat diakomodasi secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kedudukan dan peran Badan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan karakteristik tersebut, ruang lingkup program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada fungsi internal pemerintahan, seperti pengelolaan

keuangan daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah.

Dengan demikian, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada dasarnya tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara sektoral, melainkan berperan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui tata kelola keuangan yang akuntabel, pengelolaan aset yang tertib, serta optimalisasi pendapatan daerah, yang pada akhirnya memberikan kontribusi tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dilaksanakan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara manual maupun berbasis sistem aplikasi komputer, guna mendukung tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai arah kebijakan strategis pembangunan daerah untuk periode Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;

4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada Misi ke-6, yaitu "*Mewujudkan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)*". Misi tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berupa "*Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)*".

Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu "*Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel*". Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan dan Barang Milik Daerah yang tertib dan efisien.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak hanya berkontribusi pada aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD

Pernyataan visi dan misi organisasi dijabarkan lebih lanjut melalui penetapan tujuan sebagai arah capaian pembangunan yang ingin diwujudkan. Tujuan merupakan implementasi operasional dari misi organisasi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna,

periode pencapaian tujuan ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Penetapan tujuan memiliki peran strategis dalam mengarahkan seluruh unit kerja agar memiliki fokus yang sama dalam menjawab isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, tujuan harus dirumuskan secara terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Selain itu, tujuan juga berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan strategi pembangunan serta sebagai instrumen evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian, tujuan dapat dimaknai sebagai kondisi yang diharapkan dapat dicapai atau dihasilkan dalam periode perencanaan jangka menengah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan, program, serta kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah: ***“Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pelayanan Publik Yang Akuntabel.”***

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah BPKPD

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan perangkat daerah, yang diwujudkan melalui hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan sasaran dilakukan secara terukur dan terarah sebagai bagian integral dari proses perencanaan kinerja, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan yang akan dicapai.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja, indikator dan target kinerja ditetapkan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir periode pelaksanaan. Penetapan indikator dan target kinerja tersebut harus memenuhi prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable,*

Relevant, Time Bound, dan Continuously Improve), sehingga dapat menjadi alat ukur yang efektif dalam menilai pencapaian sasaran pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, rumusan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50
2.	Meningkatnya birokrasi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	94	96	98	100
			▪ Rasio pengelolaan BMD	80	85	90	95	100

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49
2.	Meningkatnya birokrasi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	81,25	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90
3.	Meningkatkan Kualitas Pegnelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			▪ Rasio Pertumbuhan PAD. (%)	2,30	2,35	2,35	2,45	2,50	2,55
			▪ Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) (%)	3	3	3	3	3	4

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan perangkat daerah yang diwujudkan melalui hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan sasaran dilakukan secara sistematis dan terukur sebagai bagian integral dari proses perencanaan kinerja, sehingga mampu memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, sasaran dirumuskan dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, perubahan kebijakan fiskal daerah, serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, indikator dan target kinerja ditetapkan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir, dengan mengacu pada prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continuously Improve*) guna menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Renstra Tahun 2025-2029. Secara substantif, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan telah diselaraskan dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target pendanaan sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Dalam Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 ditegaskan bahwa arah kebijakan utama adalah *“Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel”* dengan indikator utama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK.

1.2 Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun berdasarkan hasil penyesuaian Perubahan Renja, dengan memperhatikan capaian kinerja, dinamika pelaksanaan anggaran, serta kemampuan keuangan daerah. Program ini merupakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja internal perangkat daerah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan dan Sub Kegiatan:

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- *Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan*

❖ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- *Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD*

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- *Pengadaan Pakaian Dinas*
- *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai*
- *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
- *Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi*

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- *Penyediaan Bahan Logistik*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi*

- *Penatausahaan Arsip*
- *Dukungan SPBE*
- ❖ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**
 - *Pengadaan Kendaraan Dinas*
 - *Pengadaan Mebel*
 - *Pengadaan Peralatan dan Mesin*
 - *Pengadaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*
 - *Pengadaan Gedung dan Sarana Prasarana*
- ❖ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**
 - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi dan Utilitas*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- ❖ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
 - *Pemeliharaan Kendaraan Dinas*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*
 - *Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*
 - *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana*

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- ❖ **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Sub Kegiatan:

 - *Penyusunan dan Verifikasi RKA/DPA*
 - *Koordinasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD*
 - *Penyusunan Perda APBD dan Perkada*
 - *Pembinaan Perencanaan Anggaran*
- ❖ **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
 - *Pengelolaan Kas Daerah*
 - *Pengendalian Anggaran Kas dan SPD*
- ❖ **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

- *Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran*
- *Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan*
- *Penyusunan Laporan Keuangan Daerah*
- *Konsolidasi Laporan SKPD*
- *Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD*
- *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*

❖ **Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- *Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan TGR*
- *Pengelolaan PFK dan transaksi keuangan lainnya*

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

❖ **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Sub Kegiatan:

- *Penyusunan Standar Harga*
- *Perencanaan Kebutuhan BMD*
- *Inventarisasi Barang Milik Daerah*
- *Pengamanan Barang Milik Daerah*
- *Penilaian Barang Milik Daerah*
- *Pengawasan dan Pengendalian BMD*
- *Optimalisasi Pemanfaatan BMD*
- *Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD*

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

❖ **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Sub Kegiatan:

- *Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah*
- *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak*
- *Penetapan Wajib Pajak*
- *Penagihan Pajak Daerah*
- *Pemeriksaan Pajak Daerah*
- *Pengembangan Sistem Pajak (Elektronifikasi)*
- *Pengawasan dan Pengendalian Pajak*

Secara rinci, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Perubahan Renja SKPD BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJIRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIRA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	16			17	18		19	20		
							SEBELUM	SEKUALAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025											13
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							174.644.700.000,00	151.871.878.590,00	137.054.822.810,00	-37.589.877.190,00								172.819.700.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							174.644.700.000,00	151.871.878.590,00	137.054.822.810,00	-37.589.877.190,00								172.819.700.000,00		
	5.02	KEUANGAN							174.644.700.000,00	151.871.878.590,00	137.054.822.810,00	-37.589.877.190,00								172.819.700.000,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							19.066.081.740,00	15.605.264.435,00	13.049.911.372,00	-616.081.740,00								18.250.000.000,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							318.526.000,00	97.694.088,00	97.603.864,00	-220.922.136,00								200.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	0,00	0,00	6.690.776,00	6.690.776,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	20.745.000,00	0,00	0,00	-20.745.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	20.745.000,00	0,00	0,00	-20.745.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	19.981.000,00	0,00	0,00	-19.981.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	19.981.000,00	0,00	0,00	-19.981.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							3 Laporan	3 Laporan	136.800.000,00	64.196.278,00	57.415.278,00	-79.384.722,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AJP - PEMBUNGAHAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)					100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	3 Laporan	136.800.000,00	64.196.278,00	57.415.278,00	-79.384.722,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AJP - PEMBUNGAHAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)						100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1 Laporan	1 Laporan	101.000.000,00	33.497.810,00	33.497.810,00	-67.502.190,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AJP - PEMBUNGAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)					20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	101.000.000,00	33.497.810,00	33.497.810,00	-67.502.190,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AJP - PEMBUNGAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)						20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	11.665.230.240,00	10.636.565.000,00	9.414.332.564,00	-2.250.897.676,00							11.565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	11.665.230.240,00	10.636.565.000,00	9.414.332.564,00	-2.250.897.676,00								11.565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	11.597.182.640,00	10.636.565.000,00	9.414.332.564,00	-2.182.850.076,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); BEA BALK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BENKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBULAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN SELAJI					11.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	11.597.182.640,00	10.636.565.000,00	9.414.332.564,00	-2.182.850.076,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); BEA BALK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BENKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBULAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN SELAJI						11.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1 Dokumen	1 Dokumen	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12 Dokumen	12 Dokumen	9.951.000,00	0,00	0,00	-9.951.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	9.951.000,00	0,00	0,00	-9.951.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.250.000,00	0,00	0,00	-10.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.817.000,00	0,00	0,00	-4.817.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.929.600,00	0,00	0,00	-4.929.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terbit Administrasi Barang Milik Daerah				82 Persen	82 Persen	61.933.000,00	0,00	0,00	-61.933.000,00			-	-			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.733.000,00	0,00	0,00	-53.733.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kevenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah				82 Persen	82 Persen	89.657.600,00	0,00	0,00	-89.657.600,00			-	-			90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0001		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	4.970.000,00	0,00	0,00	-4.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0002		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.958.000,00	0,00	0,00	-59.958.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.929.600,00	0,00	0,00	-4.929.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase petyayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				95 Persen	95 Persen	613.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-611.700.000,00			-	-			530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				165 Paket	165 Paket	273.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-271.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				65 Persen	65 Persen	1.181.994.700,00	768.385.047,00	477.393.824,00	-704.600.876,00			-	-			1.180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	101.436.000,00	0,00	0,00	-101.436.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JENIS PERENCANA RENCANA STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA STRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA STRA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		Rp	Berubah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			16	17		18	19	20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2023	APBD 2023					RKPD PERUBAHAN 2023	NASIONAL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Paket Perawatan Rumah Tandang yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	99.314.000,00	73.000.000,00	33.000.000,00	-66.314.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
5.02.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	151.100.000,00	46.740.000,00	56.388.500,00	-94.711.500,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BALIK NAMA RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	99.993.500,00	50.000.000,00	38.800.000,00	-61.193.500,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BALIK NAMA RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	29.959.200,00	20.000.000,00	0,00	-29.959.200,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BALIK NAMA RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0007			Penyediaan Bahan Material																		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.262.000,00	105.547.500,00	62.947.500,00	-37.314.500,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BALIK NAMA RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0009			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	950.000.000,00	473.007.547,00	286.207.624,00	-263.742.176,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) SISA LEHUR PERHETIMANDAN ANCIKARAN TAHUN BERSELUNTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	49.930.000,00	0,00	0,00	-49.930.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Perunggotan Unsur Pemertahan Daerah																		1.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Persentase pemngkutan barang milik perangkat daerah				65 Persen	65 Persen	1.026.962.000,00	896.370.000,00	385.139.000,00	-1.551.623.000,00										1.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0002			Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan																		850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	340.000.000,00	29.769.000,00	-770.231.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	385.308.000,00	367.370.000,00	39.600.000,00	-345.798.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		680.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	686.384.000,00	189.000.000,00	315.770.000,00	-350.614.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA BALIK NAMA RENDAHAN BERMOTOR (PBBRB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					680.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0007			Pengadaan Aseel Tetap Lainnya																		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Unit Aseel Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.710.000,00	0,00	0,00	-55.710.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0008			Pengadaan Aseel Tak Berwujud																				

NO	KODE	URUSAN / BEANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKSI OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CARAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERUBAH BERKURANG (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah			Berkurang	NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Asat Tak Berekuit yang Dipeitara				2 Unit	2 Unit	29.480.000,00	0,00	0,00	-29.480.000,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Perungup Ususan Pemertahan Daerah	Perencanaan penyediaan jasa sarana perungup ususan pemertahan				85 Persan	85 Persan	2.568.715.000,00	2.910.877.500,00	2.484.519.000,00	-84.198.000,00							2.500.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Sural Menyural																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyural				12 Laporan	12 Laporan	50.007.100,00	21.000.000,00	7.200.000,00	-43.007.100,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOOTOR (BBK) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Labak																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Labak yang Dipeitara				12 Laporan	12 Laporan	321.008.500,00	586.073.500,00	441.073.500,00	120.065.000,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOOTOR (PBK) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipeitara				12 Laporan	12 Laporan	2.187.700.000,00	2.323.804.000,00	2.036.445.500,00	-191.254.500,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOOTOR (PBK) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlak Daerah Pemertahan Ususan Pemertahan Daerah	Perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perungup ususan pemertahan				90 Persan	90 Persan	629.362.000,00	293.372.300,00	188.923.120,00	-440.438.880,00							425.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perntinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeitara dan dibayarkan Pajak dan Perntinannya				18 Unit	18 Unit	119.995.000,00	178.886.000,00	100.336.500,00	-19.658.500,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOOTOR (PBK) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipeitara				5 Unit	5 Unit	19.997.000,00	0,00	0,00	-19.997.000,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Meun Lainnya																			
			Jumlah Perlatan dan Meun Lainnya yang Dipeitara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	14.200.000,00	7.100.000,00	-42.900.000,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	PAJAK ASB PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya																			
			Jumlah Asat Tetap Lainnya yang Dipeitara				2 Unit	2 Unit	9.400.000,00	0,00	0,00	-9.400.000,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Asat Tak Berekuit																			
			Jumlah Asat Tak Berekuit yang Dipeitara				2 Unit	2 Unit	9.920.000,00	0,00	0,00	-9.920.000,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeitara Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	390.000.000,00	29.807.940,00	29.807.700,00	-360.192.240,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ASB PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeitara Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	70.478.960,00	51.678.000,00	21.678.960,00	Kab. Natuna, Sumera Kecamatan, Sumera Kall Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ASB PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYULUHAN RANCANGAN APBDP YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES, DAN TEPAT ISI				90 Persan	90 Persan	151.156.157.000,00	134.477.560.304,00	122.721.695.870,00	-36.457.060,00							150.319.700.000,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	2.500.363.700,00	1.955.780.446,00	1.628.554.708,00	-671.828.992,00							2.420.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPIAS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR REVISI/RESTRUKTURISASI	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAJ yang Diaudit				1 Dokumen	1 Dokumen	19.965.000,00	0,00	0,00	-19.965.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAJ				1 Dokumen	1 Dokumen	19.965.000,00	0,00	0,00	-19.965.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0003			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.919.000,00	0,00	0,00	-19.919.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0004			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.300.000,00	0,00	0,00	-14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0005			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.300.000,00	0,00	0,00	-14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0006			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.900.000,00	0,00	0,00	-15.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	844.100.000,00	907.104.586,00	902.304.566,00	58.204.586,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	709.227.000,00	433.500.000,00	461.800.000,00	-247.427.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	14.300.000,00	0,00	0,00	-14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0010			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	220.640.900,00	0,00	0,00	-220.640.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0011			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	469.671.800,00	615.175.862,00	264.450.142,00	-235.421.658,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0012			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembelian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0013			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kota				47 Orang	47 Orang	87.895.000,00	0,00	0,00	-87.895.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan APBD				100 Person	100 Person	1.469.028.360,00	744.504.306,00	380.061.520,00	-1.088.566.840,00			-	-				1.468.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	301.754.380,00	158.032.920,00	122.685.110,00	-179.069.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PADAK ARI, PEMBIKAAAN	-	-				300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0002			Pengelolaan Sisa Lebih Pembekuan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0003			Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0004			Penelaahan Pembekuan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN REALISASI OPD TAHUN 2024	PRAKSI/AN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKSI/AN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APRO 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	317.900.000,00	245.161.220,00	141.694.800,00	-176.205.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SALUK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SBK), DAN ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			318.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			100.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Atribun Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyewisan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Atribun Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyewisan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Atribun Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyewisan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	341.310.195,00	115.681.610,00	-384.318.390,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SALUK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SBK), SISA LEBIH PERTUNJANGAN ANDARARAN TANJUN SEBELIMNYA DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			500.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Pibung dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembayaran dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pibung dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembayaran dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			100.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penempatan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penempatan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	19.527.000,00	0,00	0,00	-19.527.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Penabsorbanan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Penabsorbanan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0011		Pembiayaan Penabsorbanan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiayaan Penabsorbanan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	47 Orang	50.007.000,00	0,00	0,00	-50.007.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Parasetara Laporan Keuangan Tahunan dan asus SAP				98 Persen	98 Persen	2.027.961.000,00	759.996.650,00	409.786.400,00	-1.618.174.600,00			-	-			1.771.200.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	250.091.000,00	111.020.000,00	65.492.750,00	-183.598.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SALUK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SBK), DAN ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			250.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Awal, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LD dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Awal Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LD, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	121.980.000,00	624.000,00	624.000,00	-121.196.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SALUK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			120.000.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	178.800.000,00	191.465.000,00	57.665.000,00	-121.135.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SALUK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SBK), DAN ALOKASI UMUM (DANU)	-	-			181.200.000,00	SADAN PENDEKLAAN KELANDAN DAN PONDARITAN DAERAH
5.02.02.2.02.0004		Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRORABAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berubah Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, ELUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkumulatif				12 Laporan	12 Laporan	32.500.000,00	206.470.000,00	193.202.000,00	-202.296.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	PAJAK BAHAN BAKAR (PBB) KENDARAAN BERMOTOR (PBBK) DAN ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			393.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perangung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	205.000.000,00	126.500.000,00	99.850.000,00	-105.150.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0006			Penyusunan Tanggapan/Trisk Lajudi Terhadap LHP BPK atau Laporan Perangung-jawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	53.337.450,00	25.467.500,00	-74.532.500,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0007			Koordinasi, Sekonsum, dan Penyelidikan Turutan Perbendaharaan dan Turutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	16.330.000,00	9.285.000,00	-40.715.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBK)	-	-			50.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0008			Penyusunan Analisis Laporan Perangung-jawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0010			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0011			Peminaan Akuntansi, Pelaporan dan Perangung-jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	119.590.000,00	0,00	0,00	-119.590.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			120.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0012			Peminaan Pengelolaan Keuangan RLUD Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03.0013			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.04			Penunjang Urusan Kemudahan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 Person	100 Person	145.158.794.000,00	131.067.276.900,00	120.303.280.250,00	-24.855.490.750,00			-	-			144.980.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.04.0001			Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.954.000,00	0,00	0,00	-9.954.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.04.0002			Analisa Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.04.0003			Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	9.480.000,00	0,00	0,00	-9.480.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.04.0004			Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cukai Pokok dan Bunga Piutang Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Ndutara, Sumsu Kecamatan, Sumsu KaiDesa	DANA ALOKASI UMLM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.04.0005			Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelian Program Daerah																		SADAN PERIZIN/CLAAN KELUARAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC BASTRA OPD	REALISASI CARUM BENA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Barang/Berkas (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		13	14				15	16		17	18		19	20	21
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APRO 2024														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Pijman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				10.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.02.2.04.0006		Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Kembali Pijman Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Kembali Pijman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				10.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.02.2.04.0007		Penyusunan Kebijakan dan Abstrak Substansi																					
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Abstrak Substansi				1 Laporan	1 Laporan	9.300.000,00	0,00	0,00	-9.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				10.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.02.2.04.0008		Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan																					
			Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000.000,00	115.634.301.900,00	1.121.021.057.250,00	-22.875.942.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BADI NASAL (DB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	-				125.000.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	10.000.000.000,00	2.849.339.000,00	-150.661.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2.500.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000.000,00	5.432.897.000,00	5.432.897.000,00	-1.567.103.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-				7.000.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASSET				08 Peran	08 Peran	2.154.082.200,00	947.594.900,00	755.799.500,00	245.907.800,00								2.400.000.000,00				
	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Peran	100 Peran	2.154.082.200,00	947.594.900,00	755.799.500,00	-1.398.282.940,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga																					
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	208.982.000,00	164.594.300,00	154.851.000,00	-144.311.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BEHMOOTOR PERSEK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				300.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0002		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kabupaten Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kabupaten Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	149.879.000,00	0,00	0,00	-149.879.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				150.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kabupaten Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Rencana Kabupaten Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	48.208.600,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALK NAMA KENDARAAN BEHMOOTOR PERSEK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				100.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0005		Pembasthaan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Pembasthaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				150.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (DAK) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	-69.310.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MIT PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				200.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	261.512.300,00	169.569.000,00	-180.430.910,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BEHMOOTOR PERSEK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				350.000.000,00	SADAN PENDELCLAN KELANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5.02.03.2.01.0008		Pemilikan Barang Milik Daerah																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REGISTRA ORG	REALISASI CARAIAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CARAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CARAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENGAKTIF DAERAH PENANGKALAN AWAS	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkurang/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2023	APRIL 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Rencana Barung Misk Daerah dan Hasil Kibordasi Rencana Barung Misk Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	6.040.000,00	1.050.000,00	-198.950.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELAK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PBRK) DAN ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barung Misk Daerah				1 Laporan	1 Laporan	268.330.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	-226.780.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELAK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PBRK) DAN ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			270.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.0010			Optimalisasi Pengawasan, Pemeliharaan, Pemindahalangan, Rencunahan, dan Penghapusan Barung Misk Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.400.000,00	106.919.140,00	111.819.140,00	-88.580.860,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PALAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBRK) DAN ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.0011			Bekoralisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barung Misk Daerah				4 Laporan	4 Laporan	191.625.000,00	313.520.330,00	271.479.330,00	79.045.330,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PALAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBRK) DAN ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			320.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.0012			Penyusunan Laporan Barung Misk Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.0013			Pembinaan Pengelolaan Barung Misk Daerah Pemantab Kabupaten/Kota				47 Orang	47 Orang	149.996.200,00	0,00	0,00	-149.996.200,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
4.	5.02.04		PROGAM PENGELLOAN PENDAPATAN DAERAH				5 Person	5 Person	2.388.369.000,00	841.059.000,00	527.418.000,00	-1.618.369.000,00							1.850.000.000,00		
	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				6 Person	6 Person	2.388.369.000,00	841.059.000,00	527.418.000,00	-1.740.953.000,00								1.850.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	49.905.000,00	0,00	0,00	-49.905.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	101.920.000,00	25.040.000,00	31.448.000,00	-70.480.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELAK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PBRK) DAN ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	147.440.000,00	0,00	0,00	-147.440.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1385 Laporan	1385 Laporan	591.850.000,00	406.140.000,00	205.408.000,00	-386.441.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PALAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBRK) DAN ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006		Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENDELLOAN KEJANDAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran dan Perkotaan (PBBP2) serta Besi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BRHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Dasausalkan NUPP nya				2 Chtyek Pajak	2 Chtyek Pajak	450.416.000,00	0,00	0,00	-450.416.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			20.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keterlapan Pajak Daerah				4469 Dokumen	4469 Dokumen	398.030.000,00	177.150.000,00	117.300.000,00	-280.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN SIKROTOR (PKSK) DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			400.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	9.716.000,00	0,00	0,00	-9.716.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan verifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	59.630.000,00	0,00	0,00	-59.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			60.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011		Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah				1365 Dokumen	1365 Dokumen	196.900.000,00	192.450.000,00	133.990.000,00	-64.910.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN SIKROTOR (PKSK) DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			200.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1365 Dokumen	1365 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			50.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			10.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	149.162.000,00	39.277.000,00	39.277.000,00	-109.885.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI LUMUM (DALU)	-	-			150.000.000,00	SADAN PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H									174.644.700.000,00	151.871.878.598,00	137.054.822.810,00	-37.589.877.190,00							172.819.700.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta sebagai respons atas perubahan kebijakan pembangunan daerah, kondisi fiskal, dan kebutuhan riil penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan tahunan.

Perubahan Renja ini memuat penyesuaian terhadap target kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya, yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja pada tahun berjalan, serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan upaya optimalisasi alokasi sumber daya keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dokumen Perubahan Renja ini disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025, serta tetap selaras dengan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, Perubahan Renja ini memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Melalui Perubahan Renja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih optimal, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan serapan anggaran, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas

capaian kinerja, baik dari aspek output maupun outcome, sehingga memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perubahan Renja ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Barang Milik Daerah, serta pendapatan daerah. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah serta dukungan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pengendalian internal, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan sesuai target kinerja.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, serta penyempurnaan proses bisnis menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Ranai, 25 September 2025


SURYANTO, SE., MA

NIP. 19770912 200012 1 004